
Penerapan Kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia (1901-1973)

Kamelia Izmi F. ^{a, 1}*, Listy Nurhasanah ^{b, 2}, Naufal Al-Zahra ^{c, 3}, Ongki Bachtiar S. ^{d, 4},
Yusnia Aulia I. ^{e, 5}, Ilham Rohman Ramadhan ^{f, 6}

^{a,b,c,d,e,f} Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

¹192171041@student.unsil.ac.id, ²192171020@student.unsil.ac.id,

³192171049@student.unsil.ac.id

⁴192171025@student.unsil.ac.id, ⁵192171027@student.unsil.ac.id, ⁶ Ilham.rohman@unsil.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Australia merupakan salah satu negara dengan beragam latar belakang dan kebudayaan masyarakatnya. Dalam lembaran sejarah, Australia tercatat pernah menerapkan kebijakan rasial yang dinamakan *Immigration Restriction Act* tahun 1901-1973. Kebijakan tersebut memberi dampak yang besar terhadap proses kesadaran jati diri Australia sehingga bisa seperti sekarang. Australia menjadi tampilan bentuk negara yang terlahir karena jalinan proses keterbukaan dalam keberagaman. Berdasarkan itu, penulis mengkaji riwayat kebijakan *Immigration Restriction Act* (1901-1973). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan analisis sumber secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa arsip atau dokumen resmi yang didukung dengan sumber buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Immigration Restriction Act* banyak ditentang sehingga berpengaruh terhadap dikeluarkannya kebijakan multikulturalisme, sebagai solusi dari permasalahan imigrasi dan keberagaman di Australia.

Kata Kunci: Australia, Imigrasi, Pembatasan

Abstract

Australia is a country with diverse backgrounds and people's cultures. In the pages of history, Australia is recorded to have implemented a racist policy called the Immigration Restriction Act in 1901-1973. This policy has had a major impact on the process of Australian identity awareness so that it can become what it is today. Australia is a display of the form of a country that was born because of the interwoven process of openness in diversity. Based on that, the author reviews the history of the Immigration Restriction Act (1901-1973) policy. The research method used is historical research with descriptive qualitative source analysis. Sources of data used in the form of archives or official documents supported by sources of books, journals, and articles. The results showed that the implementation of the Immigration Restriction Act was widely opposed so that it influenced the issuance of multiculturalism policies, as a solution to the problems of immigration and diversity in Australia.

Keywords: Australia, Immigration, Restriction

PENDAHULUAN

Australia merupakan benua terkecil yang mampu berkembang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang stabil. Kendati awal pembentukan negara tersebut berasal dari percampuran dan kedatangan para imigran dari berbagai negara, namun negara dengan nama resmi *Commonwealth of Australia* tersebut berhasil merangkak menjadi negara dengan posisi yang patut diperhitungkan dalam panggung politik dunia masa kini. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 21 juta tersebut menjadi cermin upaya membentuk kedamaian dan kerja sama di tengah kemajemukan penduduknya.

Proses pembentukan Australia sehingga bisa menjadi salah satu entitas dengan keragaman etnis yang besar ternyata tidak berjalan dengan mudah (Dani & Muharjono, 2021: 2). Tercatat dalam lembaran sejarah, negara tersebut ternyata kerap melakukan diskriminasi ras. Perbedaan yang terjadi dalam kehidupan Australia dulu dan kini masih sulit diterima oleh beberapa kelompok sehingga menimbulkan stigma buruk. Kondisi seperti ini terjadi ketika bangsa Eropa mulai melakukan pelayaran dan menemukan daerah Australia yang mereka yakini sebagai *Terra Australis In Cognita*.

Benua terakhir yang ditemukan oleh penjelajah Eropa ini ternyata jauh awal ditempati oleh Suku Aborigin. Suku Aborigin dipercaya masuk dari arah utara yang berpindah untuk bertahan hidup, kurang lebih suku Aborigin sudah mendiami Australia sejak 40.000 tahun lalu (Siboro, 1989: 25). Meskipun secara periode kedatangan Suku Aborigin lebih awal, namun taraf kehidupan suku tersebut belum maju dibandingkan dengan bangsa lain pada masa itu. Bahkan ketika kedatangan bangsa Eropa, Suku Aborigin masih dalam masa *food gathering*. Proses pembangunan dan perkembangan Australia sehingga bisa menjadi seperti sekarang baru dilakukan oleh bangsa Eropa.

Australia dianggap sebagai daratan kosong dan dipilih menjadi tempat baru penampungan para narapidana oleh bangsa Eropa, sekaligus menjadi awal masa pendudukan Inggris di Australia (Erlina, 2019: 33). Seiring dengan perkembangan koloni dan kebutuhan tenaga kerja, Australia mulai dibanjiri oleh para imigran yang ingin memperbaiki nasib. Kedatangan beragam imigran dengan kebudayaan yang majemuk tentu menimbulkan permasalahan baru. Konflik-konflik ras mulai muncul di kalangan penduduk, eksistensi dan kehidupan Suku Aborigin mulai terdesak dan termarginalkan. Perbedaan budaya antara Aborigin dengan kulit putih Eropa menjadi hal yang sulit dihindari, Suku Aborigin menjadi pihak yang disubordinasi oleh pemerintah. Muncul juga sikap rasis dan diskriminasi terhadap imigran Tiongkok sebagai dampak persaingan para buruh. Ketidaksukaan terhadap orang Tiongkok dan kelompok imigran tersebut membuat beberapa koloni mengeluarkan Undang-Undang rasis seperti *Chinese Immigration Act* dan *The Pacific Islanders Labourers Act*.

Keyakinan dan pemikiran yang sama di kalangan Eropa putih memunculkan kesepakatan untuk hidup dalam keseragaman. Ketika Australia meresmikan negara persemakmuran mereka, konsep keseragaman mulai dijalankan dengan disepakatinya *Immigration Restriction Act* atau *The White Australia Policy*. Undang-undang pembatasan imigran tersebut pada dasarnya menolak imigran non-Eropa atau imigran ras berwarna di Australia. Penolakan terhadap imigran non-Eropa tersebut didorong oleh rasa superioritas bangsa Eropa berkulit putih dan menjadi cermin rasa takut menghadapi bangsa Asia yang semakin bertambah banyak (Poetrie, 2013: 10). Melalui undang-undang tersebut, tergambar bahwa pemerintah Inggris ingin membentuk masyarakat yang seragam dengan hanya menerima para imigran dari ras Eropa saja.

Kebijakan yang hanya melindungi sebagian kelompok tersebut bertahan sampai tahun 1973. Berbagai dinamika kehidupan meliputi masa Australia di bawah undang-undang tersebut. Serangkaian usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan dan kebutuhan negara. Hingga akhirnya pemerintah Australia sadar bahwa mereka tidak akan berhasil menerapkan undang-undang rasis di tengah negara yang sangat majemuk. Keberagaman masyarakat Australia justru menjadi penguat pembangunan negara tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai riwayat kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia (1901-1973). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana superioritas bangsa Eropa dan fenomena *gold rush* di Australia. Kedua, bagaimana penerapan kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia. Ketiga, bagaimana dampak penerapan kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian historis, yaitu penelitian tentang masa lalu dengan tujuan untuk membuat rekonstruksi dari kejadian di masa lalu secara sistematis dan bersifat ilmiah. Metode yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari lima langkah (Kuntowijoyo, 2005: 90); 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi, 4) interpretasi, 5) penulisan. Teknik penumpulan data yang dilakukan penulis yaitu studi literatur. Penulis mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang sesuai dan relevan dengan topik penelitian. Penulis mencari sumber secara online dengan mengakses jurnal, arsip, buku online, dan membaca buku-buku milik pribadi terkait dengan topik penelitian. Sumber yang dikumpulkan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Gold Rush*: Titik Permulaan Masalah

Penemuan ladang-ladang emas di koloni New South Wales dan Victoria pada pertengahan abad ke-19 merupakan suatu fenomena yang memicu perubahan secara signifikan di Australia.

Nyaris seluruh lini kehidupan di Australia tak terkecuali hubungan imigran dari bangsa lain terkena dampak dari kemunculan temuan-temuan yang menggiurkan tersebut. Fenomena demikian masyhur dikenal dalam literatur-literatur sejarah Australia dengan istilah *Gold Rush* atau *Gold Fever*.

Jauh sebelum fenomena *Gold Rush* menjadi tren di daratan Australia, pada awalnya masyarakat di Australia –terutama koloni Eropa- hanya mampu mengembangkan mata pencaharian dalam sektor pertanian dan peternakan. Biasanya mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berkebun, membuka ladang, serta menggembalakan ternak seperti biri-biri dan sapi di padang rumput yang terhampar luas.

Manakala memasuki dasawarsa 1850-an, tersiar kabar bahwa Edward Hargraves menemukan ladang emas di New South Wales. Kabar penemuan ladang itu disusul oleh kabar penemuan ladang emas yang melimpah ruah di Victoria. Terhitung sejak itu perhatian koloni-koloni Eropa di Australia mulai tertuju pada komoditas berharga dan amat menggiurkan ini. Dengan begitu, di samping menjadi petani dan peternak, profesi sebagai penggali ladang emas mulai jadi alternatif mata pencaharian masyarakat di Australia.

Kabar penemuan ladang emas yang tersiar ke luar Australia cukup menarik bangsa asing untuk mencari sumber penghasilan ke Australia. Orang-orang Tiongkok Selatan terutama dari Kanton (Guangzhou) di Provinsi Kwangtung (Guangdong) mulai melakukan imigrasi secara cukup masif ke Australia pada 1850-an. Kedatangan orang-orang Tiongkok ini tidak semata-mata hanya didorong oleh adanya kabar penemuan ladang emas di Australia, kedatangan mereka yang utama dipicu karena pergolakan sosial dan ekonomi yang melanda Tiongkok Selatan pada pertengahan abad ke-19. Situasi yang tidak kondusif itu menyebabkan penduduk setempat berbondong-bondong melarikan diri atau bermigrasi ke sejumlah kawasan seperti Asia Tenggara, California, Kanada, Selandia Baru, dan salah satunya ke benua Australia (Reeves, 2005: 52). Ihwal kedatangan orang-orang Tionghoa ke Australia, sebagian di antara mereka ada yang telah mendengar kabar sanak saudara mereka hidup sejahtera di Australia, (Erlina, 2019: 35). Walaupun sebenarnya apabila dikaitkan dengan situasi aktual di Australia kala itu, kabar kehidupan makmur yang dirasakan orang-orang Tionghoa di Australia tampaknya kurang sesuai yang diharapkan oleh para imigran dari Tiongkok Selatan.

Kebanyakan imigran dari Tiongkok ini datang untuk bekerja sebagai buruh ladang emas di koloni New South Wales dan Victoria. Bersamaan dengan itu, benih-benih sentimen terhadap orang-orang Tionghoa timbul di dalam koloni-koloni Eropa di Australia. Pandangan buruk terhadap imigran-imigran dari Tiongkok ini sebenarnya sudah muncul sejak 1840-an manakala imigran-imigran dari Tiongkok mulai diperkenalkan kepada masyarakat Australia dengan menggunakan pendekatan seperti di Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi waktu itu, tindakan

tersebut relatif tidak berhasil dilakukan karena dalam kenyataannya kehadiran mereka ditentang oleh koloni-koloni Eropa yang menjadi pekerja di Australia (Mc Donald, 2019: 87). Dengan munculnya gelombang imigrasi dari Tiongkok pada 1850-an, maka secara otomatis perasaan sentimen lama itu tumbuh kembali di kalangan koloni Eropa. Perasaan tidak senang tampak menguat sejak angkatan pertama buruh dari Tiongkok mulai terlibat proses ekskavasi emas bersama dengan orang-orang Eropa.

“White colonist had pursued Asian exclusion measures ever since Chinese labours first arrived on the goldfields of New South Wales and Victoria in the 1850s” (Atkinson, 2015: 6).

Sebagai benua yang kala itu belum disesaki oleh jumlah penduduk yang banyak, maraknya penemuan ladang emas di Australia pada pertengahan abad ke-19 terbukti berdampak pada peningkatan populasi penduduk di benua tersebut. Tercatat bahwa sepanjang 1840 sampai 1850-an terjadi lonjakan populasi di Australia dari 405.000 jiwa menjadi 1.145.000 jiwa. Sedangkan, jika dihitung terpisah, koloni Victoria mengalami lonjakan penduduk dari 76.000 jiwa menjadi 538.000 jiwa, (Tiffen, 1983: 86).

Seiring waktu, terutama menjelang abad ke-20, kekhawatiran koloni-koloni Eropa terhadap keberadaan imigran-imigran yang berdatangan dari Asia ini semakin meningkat. David Atkinson menyatakan bahwa telah muncul gerakan anti-Asia di Australia dalam menghadapi banjir imigran dari benua kuning tersebut, (Atkinson, 2015: 6).

Apabila ditelusuri lebih jauh sesungguhnya isu rasial bukanlah satu-satunya wacana yang digulirkan oleh koloni Eropa di Australia terhadap imigran dari Asia. Di samping kedatangannya yang relatif besar pada pertengahan abad ke-19, para pekerja ladang yang berasal dari koloni-koloni Eropa di Australia juga tidak ingin mendapatkan pesaing-pesaing yang baru, (Mc Donald, 2019: 88). Dengan demikian tampak bahwa motif ekonomi turut mengiringi dinamika relasi antara imigran Tionghoa dengan para pekerja Australia. Hal ini juga yang terbukti kerap kali mendorong umat manusia saling mencurigai dan menguasai.

Tanpa menafikan penilaian yang subyektif sebagai manusia, para pekerja Eropa di Australia memiliki pandangan yang tidak menyenangkan terhadap kebiasaan imigran-imigran Tionghoa. Meri Erlina dalam artikel ilmiah berjudul *Sejarah dan Perkembangan Multikulturalisme hingga Penghapusan White Australia Policy* (2019) mengutip pendapat R. Hardjono (1992: 79) bahwa terdapat dua kebiasaan buruh ladang emas Tionghoa yang tidak disenangi oleh pekerja-pekerja Australia antara lain yaitu; (1) sikap buruh Tionghoa yang eksklusif, tidak senang membaaur dengan orang-orang dari negara lain dan (2) buruh ladang emas Tionghoa kerap kali mengambil bijih emas dari permukaan ladang.

Agak berbeda dengan analisis di atas, Rodney Tiffen membeberkan perilaku para buruh ladang emas Tionghoa yang amoral. Ia menerangkan bahwa selain senantiasa tampil mencolok

dengan adat lokal mereka, buruh-buruh ladang emas Tionghoa juga didapati melakukan praktik prostitusi bahkan hubungan seksual antara sesama jenis (homoseksual). Mengonsumsi candu (opium) juga tidak ketinggalan menjadi aktivitas yang biasa dilakukan oleh para buruh Tionghoa. Oleh karena itulah, buruh ladang emas yang berasal dari koloni-koloni Eropa tidak senang dengan mereka, (Tiffen, 1983: 86).

Sebagai upaya menghadapi gelombang imigrasi dari luar Australia, sejumlah koloni di Australia menerapkan kebijakan pembatasan untuk para imigran pada pertengahan abad ke-19. Kendati arus imigrasi juga timbul dari Eropa, Amerika, maupun negeri Asia lainnya namun kebijakan pembatasan terhadap imigran ini ditujukan secara khusus ditimpakan untuk imigran dari Tiongkok, (Mc Donald, 2019: 6). Kebijakan pembatasan ini dipelopori oleh parlemen wilayah Victoria yang menerapkan pembatasan untuk imigran Tionghoa pada 1855 seraya menetapkan pajak yang cukup besar bagi mereka, disusul oleh parlemen Australia Selatan dan New South Wales yang menerapkan kebijakan serupa masing-masing pada 1857 dan 1861, (Atkinson, 2015: 6).

Alih-alih ditaati oleh imigran Tionghoa, kebijakan yang muncul di sebagian wilayah Australia itu justru dihiraukan oleh mereka. Imigran Tionghoa tetap memasuki wilayah Australia melalui pelabuhan-pelabuhan mana pun, (Atkinson, 2015: 6). Kemungkinan besar hal demikian terjadi dikarenakan otoritas koloni Australia tidak mampu mengontrol wilayah Australia yang begitu luas dan belum seluruhnya terjamah. Oleh karena itu, beberapa otoritas koloni Australia bekerja sama untuk menanggulangi hal ini dengan menerapkan pembatasan secara ketat dan lebih luas. Sebagai konsekuensinya, imigran dari Tiongkok menghadapi pembatasan yang begitu ketat ihwal imigrasi, pemukiman, dan pekerjaan mereka di Australia pada akhir abad ke-19 (Atkinson, 2015: 7).

Fenomena *Gold Rush* yang mengemuka pada abad ke-19 menjadi titik permulaan masalah yang berdampak pada lahirnya sebuah kebijakan diskriminatif pada permulaan abad ke-20. Sejak pertengahan abad ke-19, ruang-ruang publik Australia seakan-akan tidak pernah sepi dari wacana mempersoalkan kehadiran imigran dari Asia terutama Tiongkok. Munculnya pelbagai wacana bernada rasisme yang diiringi oleh kebijakan mengenai pembatasan yang diberlakukan oleh sebagian koloni Australia atas imigran dari Asia terutama Tiongkok menjadi indikasi yang kuat terhadap kemunculan sebuah kebijakan diskriminatif yang bersifat holistik di suatu benua yang boleh dikatakan hampir seluruhnya dihuni oleh para imigran dari pelbagai penjuru dunia.

Penerapan Kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia

Penemuan emas yang melimpah di benua Australia pada tahun 1851 dikenal dengan fenomena *Gold Rush*. Hal ini berhasil mengundang banyak imigran yang berpindah ke Australia baik dari orang-orang Eropa maupun non-Eropa. Berita mengenai pertambangan emas tersebut

membuat jumlah pendatang di Australia terus meningkat. Banyaknya imigrasi yang datang dari penjuru dunia ke Benua Australia menyebabkan timbulnya sebuah konflik. Terutama bagi orang-orang Tiongkok, yang mana mereka dianggap sebagai sebuah ancaman terbesar dalam persaingan mendapatkan emas, (Erlina, 2019). Orang-orang Tiongkok ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Australia karena mereka bersikap lebih suka berbaur dengan sesama orang Tionghoa ketimbang dengan buruh-buruh dari negara lain. Meskipun secara keseluruhan populasi orang-orang Tionghoa di Australia lebih kecil namun karena hampir seluruh pendatang dari Tiongkok merupakan laki-laki dewasa sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan dengan orang-orang Australia. Di Victoria saja, jumlah orang-orang Tiongkok pada tahun 1859 mencapai 42.000 jiwa atau 8% dari populasi keseluruhan. Serta perkiraan bahwa satu laki-laki dewasa dari tujuh orang merupakan orang-orang Tiongkok. (Marczuk, 2017)

Selain itu, orang-orang Tionghoa yang datang dalam kelompok besar memiliki penampilan dan pakaian yang berbeda dengan orang-orang kulit putih. Mereka dipandang tidak bermoral karena orang-orang Tionghoa sering melakukan praktik prostitusi serta terdapat penyimpangan seksual. Disamping itu, kegemaran orang Tionghoa akan opium dianggap sebagai bukti dari amoral mereka dalam pandangan orang-orang kulit putih. (Marczuk, 2017)

Puncak dari adanya sentimen anti-Tionghoa terjadi pada tahun 1861 di sebuah kamp emas Lambing Flat, dimana orang-orang kulit putih melakukan penyerangan terhadap pekerja dari Tiongkok. Peristiwa brutal tersebut terjadi pada tanggal 14 Juli 1861.

Dari adanya konflik tersebut, membuat pemerintah bagian New South Wales segera mengeluarkan Undang-undang mengenai pembatasan orang-orang Tionghoa untuk memasuki wilayah Australia. Undang-undang ini dikenal dengan nama *Chinese Immigration Act* yang dikeluarkan pada bulan November 1861. Kemudian Undang-undang tersebut berdampak pula bagi orang-orang Pasifik atau Kanaka di Queensland yaitu dengan dikeluarkannya *The Pasific Islanders Labourers Act* di tahun 1901. Orang Kanaka secara paksa banyak yang dipulangkan kembali ke daerah asalnya. (Rahmana Poetrie, 2013)

Selain kebijakan tersebut, pemerintah Australia menerapkan pajak bagi orang Tionghoa untuk mencegah mereka datang ke Australia sebesar sepuluh pound per setiap imigran Tionghoa. Undang-undang semacam ini pertama kali disahkan di New South Wales dan di Victoria, dimana tempat mayoritas pekerja Tionghoa tinggal.

Undang-undang yang diterapkan sebagai pembatasan serta pelarangan masuknya imigran kulit berwarna merupakan sebuah langkah awal diterapkannya *Immigration Restriction Act* atau yang lebih dikenal *The White Australia Policy* (Australia Putih). *Immigration Restriction Act* merupakan salah satu undang-undang pertama yang disahkan oleh otoritas baru, setelah pembentukan Persemakmuran Australia resmi dibentuk pada tahun 1901 setelah penyatuan bekas

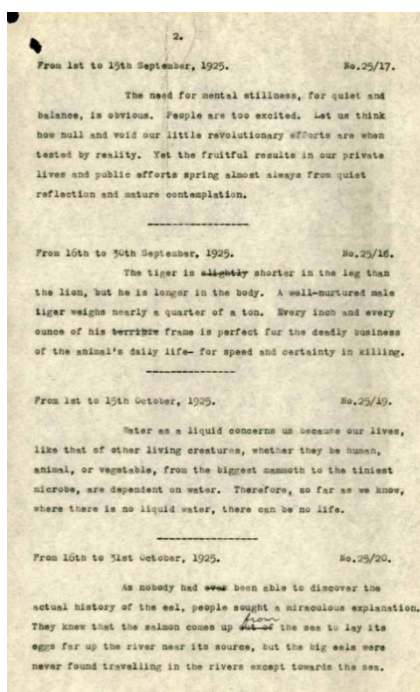
koloni Australia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi imigrasi non-Eropa, terutama imigran dari Tionghoa. Tujuan utamanya yaitu untuk melarang imigran terlarang memasuki wilayah Australia. Kategori imigran terlarang yang dimaksud yaitu yang pertama adalah orang-orang yang tidak lulus tes dikte (*dictation test*). Kedua adalah orang idiot atau gila, orang yang menderita penyakit menular, kemudian orang yang pernah melakukan pelanggaran hukum atau politik dan orang yang terlibat prostitusi. (Robertson et al., 2005)

Pemerintah Australia mengatakan bahwa alasan utama mengapa undang-undang ini disetujui adalah untuk mencegah imigran yang tidak diinginkan, terutama dari Tionghoa. Undang-Undang Pembatasan Imigrasi atau *Immigration Restriction Act* disahkan pada 23 Desember 1901. Alat utama dari kebijakan *Immigration Restriction Act* yaitu tes dikte (*dictation test*) yang harus dilalui oleh para imigran yang ingin memasuki wilayah Australia, tujuan penerapan tes bahasa bukanlah untuk mengizinkan orang masuk ke wilayah Australia akan tetapi untuk mencegah mereka keluar. Tes ini merupakan sebuah tes tulis dan wawancara dan presentasi untuk mengetes kemampuan para imigran dalam menggunakan salah satu bahasa di negara Eropa. Bahasa yang diuji yaitu bahasa Inggris dan Prancis. Apabila calon imigran tidak dapat mempresentasikan minimal 50 kata maka mereka gagal dan tidak dapat memasuki wilayah Australia. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang bisa memasuki wilayah Australia adalah orang-orang yang berasal dari Australia dan secara otomatis mengeliminasi orang-orang non-Eropa.

Sikap diskriminasi rasial yang dilakukan oleh orang Australia dipengaruhi pula oleh adanya ideologi bahwa orang-orang berkulit putih dianggap superior serta memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit berwarna, bahkan orang-orang kulit putih juga tidak mengakui keberadaan ras Aborigin yang merupakan penduduk asli di Australia. Orang-orang Australia yang mayoritas merupakan imigran dari Inggris ingin membentuk sebuah negara yang masyarakatnya secara utuh berasal dari ras kulit putih.

Sehingga ketika adanya imigrasi besar-besaran dari Asia yang terus meningkat menimbulkan ketakutan dari orang-orang kulit putih yang beranggapan di masa mendatang hal tersebut akan menyebabkan ras mereka akan menjadi minoritas di Australia. (Rahmana Poetrie, 2013)

Gambar 1. Contoh tes yang digunakan pada 1925





Gambar 2. Contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang ketika imigran lolos dalam *dictation test*

Buruh Australia memiliki pengaruh dalam sistem politik dan sosial di Australia. Mereka dengan partai buruhnya berusaha menekan pemerintah agar tidak ada kebijakan yang sengaja membawa buruh Asia untuk dipekerjakan di Australia. Sebab orang-orang Asia dianggap akan merusak moral dalam kehidupan masyarakat serta akan menurunkan upah buruh di Australia. Namun berbanding terbalik dengan partai buruh liberal yang menyetujui kehadiran dari orang-orang Asia. Mereka menganggap bahwa sudah saatnya Australia mengambil sikap terhadap kehadiran para pendatang dengan menjadikan Australia menjadi sebuah negara yang memiliki keragaman ras. Sebagai respons dari pernyataan partai liberal, maka dikeluarkan sebuah Undang-undang mengenai kependudukan yang bernama *Naturalisation Act* pada tahun 1903. Dalam peraturan tersebut mengatur semua penduduk Australia merupakan penduduk yang sudah disahkan keberadaannya oleh pemerintah, namun peraturan tersebut hanya berlaku untuk orang Australia keturunan Eropa. (Erlina, 2019)

Diterapkannya kebijakan *Immigration Restriction Act* membuat populasi penduduk Australia berkurang. Hal ini tidak dapat menutup mata pemerintah Australia akan kebutuhan populasi yang besar di Australia, dalam hal ini pula pemerintah tidak dapat terus bergantung pada imigran dari Inggris, sehingga pemerintah Australia memberi kesempatan untuk imigran non-Inggris untuk hidup di Australia dengan syarat mereka wajib memiliki keahlian yang berguna untuk Australia.

Kebijakan *Immigration Restriction Act* diwujudkan dengan diterapkannya kebijakan asimilasi dibawah pemerintah perdana menteri Cheifley dengan mengangkat Athur Augustus Calwell sebagai

menteri Imigrasi pada tanggal 13 Juli 1945 dari partai buruh yang berkuasa. Perdana menteri Chifley berusaha menambah populasi Australia melalui program imigrasi. Setelah pengangkatan Menteri Imigrasi Calwell mengumumkan adanya program bantuan dari pemerintah untuk imigran dengan tujuan agar populasi di Australia bertambah 2% setiap tahunnya, yakni 1% berdasarkan pertumbuhan alami dan 1% dari pendatang. Penerapan kebijakan tersebut disetujui oleh semua partai karena adanya program tersebut merupakan sebuah perubahan sikap dari partai buruh dari masa sebelumnya yang sangat menentang dan membatasi kehadiran kaum imigran yang menjadi sebuah ancaman bagi buruh Australia. (Erlina, 2019)

Komite penasihat imigran mulai mengadakan kunjungan ke Eropa pada bulan September 1945 untuk mencari calon imigran yang dapat didatangkan ke Australia. Pemerintah Australia akan lebih memprioritaskan imigran dari Inggris yang dapat datang ke Australia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan terciptanya hubungan dengan pemerintah Inggris pada tanggal 6 Mei 1946 sebagai upaya mendatangkan imigran Inggris ke Australia. Adapun kriteria yang disepakati yaitu imigran bekas tentara, orang bebas, perempuan serta orang-orang kurang berada. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian yang terjalin menghadapi banyak kendala seperti transportasi kapal yang sulit disediakan yang pada akhirnya pemerintah Australia berusaha menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti PBB yaitu dengan melakukan perjanjian untuk menerima pengungsi dari korban perang. (Erlina, 2019)

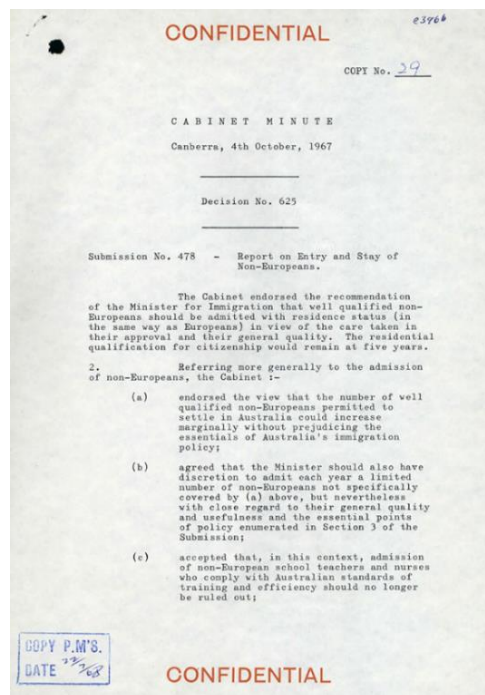
Besar harapan para imigran dapat hidup bahagia di wilayah baru ternyata tidak berjalan mulus. Hal ini terbukti dengan para imigran yang masih kesulitan mencari uang dan tempat tinggal yang aman. Penerapan kebijakan asimilasi kemudian diteruskan oleh perdana menteri selanjutnya yaitu Menzies. Pada masa pemerintahannya mulai bermunculan sikap menentang kebijakan asimilasi sebab dipandang telah memaksa imigran untuk menghilangkan identitas diri dengan berusaha melupakan latar belakang negara budaya dan bahasanya. Selain itu adanya Kebijakan *Immigration Restriction Act* telah menciptakan diskriminasi rasial bagi orang Asia, Afrika bahkan orang-orang Aborigin.

Pada tahun 1965 partai buruh Australia mengadakan sebuah Konferensi Federasi Partai Buruh yang memutuskan untuk menghapuskan kebijakan *Immigration Restriction Act* dari landasan partai. Tokoh-tokoh yang mendukung penghapusan kebijakan tersebut yaitu Gough Whitlam dan Don Dunstan. Partai buruh yang telah berevolusi dengan pemimpin barunya mendukung pula penghapusan kebijakan *Immigration Restriction Act* dan mendukung adanya kebijakan imigrasi yang bersifat simpati, dan toleran.

Kemudian pada masa pemerintahan O'Keefe dari partai koalisi Liberal Nasional diangkat sebagai menteri Imigrasi mengumumkan adanya sebuah peraturan baru untuk imigran yang berasal dari non-Eropa yang ingin menjadi warga negara Australia. Kebijakan ini diterapkan karena dinilai bahwa perbedaan ras tidak relevan dengan kemajuan zaman, serta O'Keefe berharap adanya imigran tersebut dapat ikut berkontribusi dalam membangun Australia dalam segala aspek.

Pemerintah Australia kemudian mengeluarkan pembelajaran bahasa Inggris yang digelar secara terbuka. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bahasa Inggris dianggap penting untuk digunakan dalam bekerja. (Erlina, 2019)

Kebijakan *The White Australia Policy* ini secara bertahap mulai dihapus sejak berakhirnya perang dunia ke dua, hal tersebut juga ketika terjadi imigrasi pertama non-Inggris dan non kulit putih hal tersebut menjadi dorongan dan pelecut pemerintah Australia secara bertahap menghapus kebijakan Australia putih. Kebijakan ini berakhir ketika tahun 1973 ketika pemerintah Australia mengeluarkan undang-undang untuk memastikan bahwa ras akan benar-benar diabaikan sebagai komponen untuk imigrasi ke Australia.



Gambar 3. Pemerintah Australia Mulai Memperbolehkan Orang Non-Eropa Masuk
Dampak Penerapan Kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia

Kebijakan *Immigration Restriction Act* yang ditetapkan di Australia bertujuan untuk membatasi arus imigrasi orang-orang non-kulit putih atau non-Eropa ke benua Australia. Kelahiran kebijakan ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari dampak fenomena *Gold Rush* di Australia yang menyebabkan imigran dari berbagai negara datang ke Australia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang kulit putih Eropa, jika para imigran khususnya bangsa Asia populasinya semakin meningkat di Australia mereka khawatir jika suatu saat nanti populasi penduduk kulit putih Eropa akan semakin menurun.

Ditetapkannya kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia pada tahun 1901 memiliki dampak yang cukup signifikan di Australia. Pihak yang sangat terdampak dari adanya kebijakan ini ialah para imigran di Australia yang mana sekitar 3.600 orang yang berasal dari pulau-pulau di Pasifik (Kanakas) dikembalikan ke negara asalnya secara paksa dan hanya 2.500 orang diizinkan tinggal di Australia khususnya di Queensland. Adapun dengan imigran Tionghoa, sebanyak 32.000 orang yang

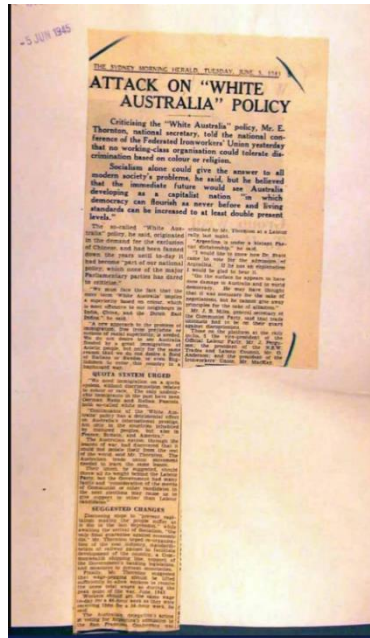
sudah menetap di Australia diizinkan tinggal di Australia. Begitu pula dengan imigran lainnya seperti Afghanistan, India dan Jepang. (Siboro, 1989 : 146)

Kebijakan *Immigration Restriction Act* ini didukung dan disetujui oleh seluruh negara bagian di Australia sehingga dengan kebijakan ini dapat menumbuhkan kebersamaan di antara mereka khususnya orang-orang kulit putih. Mereka juga sepakat tidak akan ada diskriminasi lagi jika kebijakan *Immigration Restriction Act* ini diterapkan akan menjalankan keseragaman dalam berbagai bidang kehidupan baik itu kehidupan politik, sosial, maupun ekonomi. (Erlina, 2019 : 36)

Dengan ditetapkannya kebijakan *Immigration Restriction Act* ini tidak serta merta membuat orang luar berhenti bermigrasi ke Australia. Beberapa imigran non-kulit putih atau non-Eropa yang tetap ingin bermigrasi harus menjalani tes seleksi. Tes seleksi ini diselenggarakan untuk menguji kemampuan bahasa para imigran dalam menggunakan bahasa di salah satu negara Eropa, tes tersebut disebut dengan *dictation test*. Bahasa yang diujikan antara lain bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia dan bahasa Eropa lainnya. (Poetrie, 2013 : 10) Tes yang diselenggarakan berupa tes tulis, lisan, dan presentasi. Nilai minimum yang harus mereka peroleh ialah 50, sementara itu jika tidak mampu mencapai nilai tersebut mereka dianggap gagal dan akan dideportasi. Dalam kegiatan tes ini, nantinya imigran akan di tes oleh para petugas imigrasi Australia. (Erlina, 2019 : 36)

Dibatasinya imigran non-kulit putih di Australia ini cukup berdampak bagi kehidupan dalam negeri Australia. Pasca Perang Dunia II, Australia mengalami krisis penduduk yang cukup parah. Luas wilayahnya yang mencakup 7,7 juta m² hanya memiliki penduduk sejumlah 7,5 juta orang. Dengan diterapkannya tes seleksi masuk Australia hingga tahun 1958 ini juga-lah yang membuat jumlah imigran dari negara lain khususnya Asia mengalami penurunan. (Anwar, 2007 : 11)

Dalam perjalanannya, kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia ternyata mendapat kritikan dari dalam maupun luar negeri karena kebijakan tersebut dianggap sebagai rasialisme dan diskriminasi terhadap bangsa lain yang kemudian menimbulkan kebijakan multikulturalisme di Australia pada pemerintahan PM Witham. Meskipun kebijakan ini didukung dan disetujui oleh negara bagian di Australia, namun dalam perjalanannya terdapat kritikan dari dalam negeri Australia itu sendiri. Kebijakan *The White Australia Policy* ini mampu menyinggung negara lainnya seperti Tiongkok dan India. Tidak hanya itu dampak dari *The White Australia Policy* ini sangat merugikan prestise internasional Australia. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan kembali mengenai *The White Australia Policy* ini misalnya dengan menggunakan imigrasi sistem kuota tanpa diskriminasi ras maupun warna kulit. Kritikan tersebut dimuat dalam pada surat kabar *The Sydney Morning Herald* dengan judul *Attack on "White Australia" Policy* keluaran tahun 1945.



Gambar 4. Kritik tokoh Australia terhadap *The White Australia Policy* dalam surat kabar *The Sydney Morning Herald*

Kritik dari luar negeri datang dalam merespons kebijakan diskriminatif ini. Mula-mula dari Jepang pada tahun 1905. Hal ini terjadi karena pemerintahan Australia menetapkan tes seleksi bagi para imigran. Menurut Jepang, tes seperti itu bersifat diskresi sehingga Jepang membela imigran dari Asia dan tidak menyetujui adanya kebijakan tersebut. (Marsczuk, 2017 : 45). Selanjutnya kritik datang dari Malaysia -kala itu masih Malaya- pada tahun 1955. Dr.Toh seorang dosen Psikologi Universitas Malaya menyebutkan bahwa *White Australia Policy* ini sangat sensitif bagi mereka dan sudah seharusnya Australia menerima orang-orang Asia di Australia. Australia harus secara serius mempertimbangkan kebijakan ini dan melonggarkan kebijakan bagi imigran Asia. Hal tersebut dimuat pada surat kabar *News From Oversea* dengan judul *White Australia Policy Angers Malaya more than Diggers* keluaran tahun 1955.



Gambar 5. Kritik dari Malaya terhadap *The White Australia Policy* dalam surat kabar *News From Overseas* 1955

Dengan diterapkannya kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia, membuat hubungan politik Australia dengan negara non Eropa menjadi menegang. Australia yang merupakan

commonwealth Inggris ini secara tidak langsung memberikan dampak bagi hubungan politik luar negeri Inggris akibat dari diterapkannya kebijakan *Immigration Restriction Act* ini. Kebijakan ini melarang adanya migrasi dari orang non-Eropa sedangkan sebelumnya di Australia sudah banyak orang non-Eropa khususnya Tiongkok, Jepang, India dan lainnya. Citra Australia dihadapan dunia internasional cukup buruk dengan adanya kebijakan *Immigration Restriction Act*. Secara tidak langsung hubungan Australia maupun Inggris dengan negara-negara tersebut cukup menegang. Bahkan pemerintah Jepang menanggapi kebijakan tersebut dengan serius dan tentunya menolak adanya kebijakan tersebut. (Atkinson, 2015 : 18)

Kebijakan *Immigration Restriction Act* di Australia ini tentunya diterapkan demi kepentingan orang kulit putih Eropa di Australia namun hal ini merugikan bagi mereka orang non-kulit putih yang sulit untuk masuk ke Australia. Kebijakan tersebut juga sejatinya mengundang berbagai kritik dari pemerintah luar negeri khususnya Asia yang memandang Australia sebagai negara yang mengedepankan rasialisme sehingga citra Australia di internasional dapat dikatakan buruk. Hingga pada akhirnya kebijakan tersebut dihapus pada 1973 dengan berbagai pertimbangan demi kemajuan Australia di masa mendatang.

KESIMPULAN

Australia yang dewasa ini populer sebagai salah satu negara yang kerap kali menjadi tempat pencari suaka dari negara-negara lain sesungguhnya memiliki riwayat yang cukup kelam dalam menghadapi orang-orang dari luar Australia. Kebijakan *Immigration Restriction Act* atau yang masyhur dikenal dengan *The White Australia Policy* yang ditetapkan pada awal abad kw-20 menjadi bukti bahwa sesungguhnya pemerintah Australia pernah memperlakukan para imigran secara diskriminatif.

Sepanjang kurun tersebut otoritas Australia sangat selektif dalam memberi izin bagi orang-orang yang berdatangan dari luar negeri mereka. Namun, setelah kebijakan ini berjalan selama sekitar 72 tahun serta mendapatkan pelbagai tanggapan miring dari negara-negara Asia, akhirnya pemerintah Australia sadar bahwa *Immigration Restriction Act* tidak cocok lagi untuk diterapkan di Australia. Pencabutan kebijakan ini pada 1973 menjadi tanda bahwa sejak saat itu Australia mulai mendeklarasikan diri sebagai negara yang terbuka dan berkomitmen terhadap keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. (2007). Representasi Multikulturalisme Australia Dalam Puisi Wogs Karya Ania Walwicz. *Lingua Didaktika*, 1(1).
- Atkinson, D. (2015). *The White Australia Policy, The British Empire, And The World*. *Purdue E-Pubs*.
- Dani, M., & Muharjono. (2021). Australian Human Rights Commission (Ahrc) Dalam Mengurangi Kasus Diskriminasi Ras Di Australia Tahun 2015-2018. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 24(1), 1–29.
- Erlina, M. (2019). Sejarah Dan Perkembangan Multikulturalisme Hingga Penghapusan White Australia Policy. *Jurnal Pendidikan Sejarah Stkip Persatuan Islam*, 2(1), 33–45.

- Kuntowijoyo. (2005). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Pustaka..
- Marczuk, K. P. (2017). Origins Of Immigration To Australia, 1787-1914. *Arhivele Olteniei*, 31(31), 39–50.
- Mc Donald, Peter. (2019). Migration To Australia: From Asian Exclusion To Asian Predominance. *Revue Europeenne Des Migrations Internationales*. Vol. 35. No. 1 & 2. Hlm. 87-105.
- Poetrie, S. T. R. (2013). Diskriminasi Imigran Kulit Putih Berwarna Dalam Masa Kebijakan Multikulturalisme Pasca Penghapusan White Australia Policy. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya* Vol., 1(2).
- Rahmana Poetrie, S. (2013). Diskriminasi Imigran Kulit Putih Berwarna Dalam Masa Kebijakan Multikulturalisme Pasca Penghapusan White Australia Policy. *Lakon: Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya*, 1(2).
- Reeves, Keir. (2015). Tracking The Dragon Down Under: Chinese Cultural Connections In Gold Rush Australia And Aotearoa, New Zealand. *Graduate Journal Of Asia-Pasific Studies*. Vol. 3. No.1. Hlm. 49-66.
- Robertson, K., Hohmann, J., & Stewart, I. (2005). Dictating To One Of “Us”: The Migration Of Mrs Freer. *Macquarie Law Journal*, 5(August), 241.
- Tiffen, Rodney. (1983). The White Australia Policy And Asian Immigration. *Australia Quarterly*. Vol. 160. Hlm. 85-100.
- Siboro, J. (1989). Sejarah Australia. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- https://Www.Academia.Edu/37002904/K.P._Marczuk_2017._Origins_Of_Immigration_To_Australia_1787-1914._Arhivele_Olteniei_31_Pp._39-50
- http://en.wikipedia.org/wiki/White_Australia_policy
- <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/white-australia-policy>. Diakses 08-06-2022 Jam 22.49
- https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/APF/monographs/Within_Chinas_Orbit/Chapterone. Diakses: 08-06-2022
- <https://www.naa.gov.au/learn/learning-resources/learning-resource-themes/society-and-culture/migration-and-multiculturalism/dictation-test-passages-used-1925>
- <https://www.naa.gov.au/learn/learning-resources/learning-resource-themes/society-and-culture/migration-and-multiculturalism/certificate-exempting-florrie-lee-hang-gong-dictation-test>
- <https://www.naa.gov.au/learn/learning-resources-themes/society-and-culture/migration-and-multiculturalism/newspaper-report-criticism-white-australia-policy>
- Rahasia Arsip. Berita Acara Kabinet Caneberra, 4 Oktober 1967. Keputusan No. 625